

J. CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG KEGIATAN USAHA DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG SEBENARNYA

SURAT PERNYATAAN
TENTANG KEGIATAN USAHA DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA SEBENARNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP : (2)
Alamat Tempat Tinggal : (3)
Alamat Posel/*e-Mail* : (4)
Nomor *Handphone* : (5)

Bertindak selaku wakil/kuasa Wajib Pajak*):

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Alamat Posel/*e-Mail* : (9)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak bertempat kedudukan di kantor virtual dan memiliki:

1. susunan pengurus dengan perincian sebagai berikut**:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat Tempat Tinggal : (12)
Jabatan : (13)
Nomor *Handphone* : (14)
Alamat Posel/*e-Mail* : (15)

2. kegiatan usaha utama.....(16) dan kegiatan usaha lainnya.....(17)

3. tempat kegiatan usaha utama Pengusaha Kena Pajak berlokasi di***:

a. alamat : (18)
b. Provinsi : (19)
c. Kab/Kota : (20)
d. Kecamatan : (21)
e. Desa/Kel. : (22)
f. NITKU : (23)
g. Nama Penanggung Jawab : (24)
h. Nomor Identitas Penanggung Jawab : (25)
i. Jabatan : (26)

4. tempat kegiatan usaha lainnya****

a. alamat : (27)
b. Provinsi : (28)
c. Kab/Kota : (29)
d. Kecamatan : (30)
e. Desa/Kel. : (31)
f. NITKU : (32)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

.....,20 (33)
Wakil/Kuasa Wajib Pajak*),



..... (34)

*Coret yang tidak perlu
**Cantumkan seluruh data pengurus
***Dalam hal tidak memiliki Tempat Kegiatan Usaha lain selain di Kantor Virtual
maka dapat diisi dengan data Kantor Virtual
****Jika ada, bisa ditambahkan lebih dari 1 (satu)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TENTANG KEGIATAN USAHA
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA SEBENARNYA

- Nomor (1) : diisi dengan nama wakil/kuasa Wajib Pajak yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (2) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wakil/kuasa Wajib Pajak yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat tempat tinggal wakil/kuasa Wajib Pajak yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (4) : diisi dengan alamat posel/*e-Mail* wakil/kuasa Wajib Pajak yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor *handphone* wakil/kuasa Wajib Pajak yang membuat surat pernyataan.
- Nomor (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan alamat posel/*e-Mail* Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan nama pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (11) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (12) : diisi dengan alamat tempat tinggal pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (13) : diisi dengan jabatan pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (14) : diisi dengan nomor *handphone* pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (15) : diisi dengan alamat posel/*e-Mail* pengurus Wajib Pajak Badan.
- Nomor (16) : diisi dengan uraian kegiatan usaha utama Wajib Pajak Badan.
- Nomor (17) : diisi dengan uraian kegiatan usaha lainnya Wajib Pajak Badan.
- Nomor (18) : diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (19) : diisi dengan nama provinsi tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (20) : diisi dengan nama kabupaten/kota tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (21) : diisi dengan nama kecamatan tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (22) : diisi dengan nama desa/kelurahan tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (23) : diisi dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) tempat kegiatan usaha utama dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Nomor (24) : diisi dengan nama penanggung jawab di NITKU dimaksud.
- Nomor (25) : diisi dengan nomor identitas (NIK/NPWP) penanggung jawab NITKU.
- Nomor (26) : diisi dengan jabatan penanggung jawab NITKU.
- Nomor (27) : diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (28) : diisi dengan nama provinsi tempat kegiatan usaha lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (29) : diisi dengan nama kabupaten/kota tempat kegiatan usaha lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (30) : diisi dengan nama kecamatan tempat kegiatan usaha lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (31) : diisi dengan nama desa/kelurahan tempat kegiatan lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (32) : diisi dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) tempat kegiatan usaha lainnya (jika ada) dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (33) : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat.
- Nomor (34) : diisi dengan wakil/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan.